



MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP : 3843348, 3810350, 3457661 FAX.3810361
TROMOL POS NO. 1020 – JAKARTA 10110

Jakarta, 2 Juni 2017

Nomor : 31/a/BUA.4/PL.07/06/2017
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permintaan Dokumen RKBMN

Yth,

1. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung;
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung;
3. Para Sekretaris Badan di Lingkungan Mahkamah Agung;
4. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
5. Koordinator Wilayah pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan Se-Indonesia.

Di tempat

Memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 150/PMK.05/2014, tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2019, dengan ini di informasikan terkait RKBMN yang sudah di sampaikan melalui aplikasi *Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN)* maka sesuai arahan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan bahwa dokumen RKBMN tersebut masih harus dilengkapi dengan :

1. Pengajuan RKBMN *Pengadaan dan Pemeliharaan* melalui aplikasi *Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN)*;
2. RKBMN bentuk hard copy dan sudah di tanda tandangi serta stempel dari masing-masing Pengguna Barang (*Asli*);
3. Untuk *Satker* yang mengajukan *Usulan Pengadaan Rumah Negara* agar dilampirkan data dukung berupa hasil konsultasi dengan Dinas Pekerjaan Umum setempat terkait dengan Pembangunan Rumah Negara.

Mengingat pentingnya data tersebut dalam bentuk *hardcopy*, dengan hormat dimohon agar kelengkapan tersebut segera dikirimkan ke **Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung** paling lambat tanggal 21 Juli 2017. Apabila melewati tanggal tersebut akan dianggap tidak mengajukan RKBMN Tahun Anggaran 2019.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Perlengkapan

Muhamad Ashar

NIP. 19571223 197902 1 001

Tembusan :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
2. Sekretaris Mahkamah Agung;
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
4. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
5. Kepala Badan pengawasan Mahkamah Agung;
6. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
7. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.